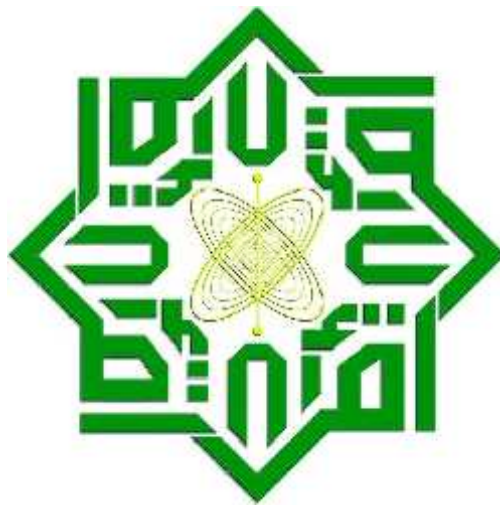


**PELAKSANAAN PENAHANAN BENDA GADAI TERHADAP
BENDA MILIK DEBITUR OLEH PERUM PEGADAIAN
APABILA DEBITUR WANPRESTASI
(Studi Kasus Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



OLEH

IDES PUSPITA SARI

NIM: 10827003740

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKABARU
2013**

ABSTRAK

Perusahaan umum pegadaian adalah salah satu lembaga yang menyalurkan kredit kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman dengan memberikan suatu benda bergerak yang dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman tersebut. Tugas pokok adalah memberi pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat. Perum pegadaian didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 103 tahun 2000 tentang Perusahaan Umum Pegadaian.

Adapun Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tindakan dan akibat hukum dari debitur yang wanprestasi oleh Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota, dan apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota dan penyelesaian dalam pelaksanaan penahanan benda gadai.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian langsung lapangan. Untuk pengumpulan data di peroleh dari observasi, wawancara dan angket. Sifat dari penelitian ini Deskriptif, dalam penelitian ini ditetapkan yang menjadi populasi dan responden yaitu 1 orang pemimpin cabang pegadaian cabang Pekanbaru kota, 1 orang pegawai perum pegadaian cabang Pekanbaru kota bagian manajer fidusia dan jasa lainnya, dan 20 orang debitur atau nasabah sehingga total populasi dan responden berjumlah 22 orang.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana tindakan dari perum pegadaian terhadap debitur yang wanprestasi, yang disebabkan oleh debitur yang lalai dalam memenuhi kewajibannya. Akibat hukum tersebut yaitu terjadinya wanprestasi (ingkar janji). Keterlambatan pembayaran angsuran kredit yang telah jatuh tempo pihak pegadaian memberikan somasi kepada nasabah atau debitur, apabila tidak diindahkan maka pihak pegadaian akan melakukan pelelangan terhadap benda gadai tersebut.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya salawat dan salam penulis kirimkan kepada nabi kita Muhammad SAW yang menjadi contoh dan tauladan dalam kehidupan manusia.

Skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PENAHANAN BENDA GADAI TERHADAP BENDA MILIK DEBITUR OLEH PERUM PEGADAIAN APABILA DEBITUR WANPRESTASI (Studi Kasus Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota)**

merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Untuk kuliah dan dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyatakan dengan penuh hormat ucapan terima kasih kepada :

1. Ayahanda Syahru Ramadhan, Ibunda Kasmawati, yang tidak pernah lelah berkorban dan berdoa untuk Ananda agar menjadi orang yang berguna, sehingga dapat mewujudkan cita-cita.
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh stafnya.
3. Bapak Dr. H. Akbarizan, M. Ag. M. Pd. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Ibu Hj. Nuraini Sahu, SH.MH. Sebagai pembimbing dalam penulisan skripsi ini dan selaku ketua jurusan Ilmu hukum yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan kemudahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak H, Magfirah, SH. M. Ag. Selaku sekretaris Jurusan Ilmu Hukum. Bapak dan Ibu Dosen serta staf Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis
6. Bapak Drs, Hajar.M.MH. Selaku penasehat Akademik
7. Seluruh karyawan/ti akademik Fakultas Syariah dan Ilmu hukum yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama perkuliahan.
8. Bapak Januardi SE, selaku pimpinan cabang Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota dan karyawan/karyawti yang ada di Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota.
9. Seluruh keluargaku tercinta adikku Agung Dodi Ramadhan dan Armen Abdi Ramadhan, Nenekku Nurkia dan seluruh keluarga yang lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu mengeluarkan biaya untuk menyelesaikan kuliah, setia mendampingi di saat suka dan duka. Selain itu juga untuk keponakan-keponakanku tersayang, yang selalu membuat hari-hariku ceria.
10. Buat teman-teman seperjuangan yang telah banyak memberikan masukan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan serta mendapatkan ridho dariNya, semoga kita termasuk orang-orang yang dinantikan oleh Rasulullah ditelaga Al-Kausar. Amin.

Pekanbaru, 8 Januari 2013

IDES PUSPITA SARI
10827003740

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

NOTA PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... iv

DAFTAR TABEL vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Batasan Masalah. 9

C. Rumusan Masalah..... 9

D. Tujuan Penelitian 9

E. Manfaat Penelitian..... 10

F. Metode Penelitian 10

G. Sistematika Penulisan. 14

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Ringkas Perusahaan Umum Pegadaian 16

B. Visi dan Misi Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota 18

C. Budaya Perusahaan Umum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota... 18

D. Struktur Organisasi Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota... 19

E. Jenis Produk Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota.....21

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG GADAI

A. Pengertian Gadai 24

B. Tahap-Tahap Pembebanan Jaminan Gadai. 28

C. Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Gadai 31

D. Hapusnya Gadai..... 35

E. Wanprestasi 3

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Tindakan Yang Dilakukan Oleh Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota Apabila Debitur Wanprestasi	38
B. Kendala-Kendala Yang Di Hadapi Oleh Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota Dalam Pelaksanaan Penahanan Benda Gadai.....	50
C. Penyelesaian Terhadap Kendala Yang Dihadapi Oleh Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota.....	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Tentang Penggolongan Uang Pinjaman, Besar Bunga, dan Jangka Waktu Pinjaman	7
Tabel IV.1	: Tentang Faktor-Faktor Penyebab Nasabah Wanprestasi	42
Tabel IV.2	: Tentang Batas Waktu Pengembalian Kredit	43
Tabel IV.3	: Tentang Somasi Dari Pihak Perum Pegadaian	46
Tabel IV.4	: Tentang Kepemilikan Barang Yang Di Gadaikan.....	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari, setiap orang selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu kebutuhan pokok maupun kebutuhan lainnya. Apabila seseorang pada saat tertentu membutuhkan dana untuk kepentingan mendesak sedangkan dia kekurangan dana, maka salah satu jalan dengan cara meminjam uang atau utang untuk memperoleh tambahan uang.

Dalam pembangunan ekonomi, termasuk di dalamnya pembangunan bidang politik dan ekonomi, Negara memegang peranan penting dalam penentuan cara-cara pemberian kesempatan kredit oleh lembaga-lembaga kredit. Sesuai dengan pertimbangan ekonomi yang ada, ditentukan jumlah pemberian fasilitas kredit dan kredit-kredit investasi dalam industri. Juga pertumbuhan ekonomi yang demikian dimungkinkan pemberian kredit dengan benda bergerak dan benda tidak bergerak sebagai jaminan.

Keberadaan utang piutang cukup diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk memenuhi kebutuhan pokok, maupun untuk memenuhi kebutuhan lainnya, tetapi dalam kenyataannya, untuk memperoleh pinjaman berupa uang tidaklah mudah, hal ini dikarenakan pihak pemberi pinjaman atau kreditur tidak bersedia memberi pinjaman tanpa adanya kepastian tentang pelunasan pinjaman tersebut. Oleh karena itu, biasanya pihak kreditur akan

meminta jaminan kepada pihak peminjam atau kreditur, sehingga kepastian untuk pelunasan atau pinjaman yang telah diberikan.

Dengan adanya hutang-piutang maka timbul adanya lembaga keuangan baik yang didirikan oleh pemerintah maupun swasta, dalam bentuk bank maupun non bank. Selain bank sebagai lembaga keuangan dan kredit, masih ada lembaga keuangan lain yang beroperasi dalam lingkungan serta sarana berbeda-beda, termasuk lembaga pegadaian, asuransi, sewa guna usaha (leasing) dan lembaga keuangan bukan bank serta pasar uang dan modal.

Salah satu bentuk hak kebendaan untuk menjamin utang yang obyeknya benda bergerak ialah gadai. Adapun ketentuan mengenai gadai sendiri diatur dalam KUHPerdara Buku II Bab XX, pasal 1150 sampai dengan pasal 1160, sedangkan pengertian dari gadai sendiri diatur dalam pasal 1150 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut :

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang untuk berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang berutang atau seseorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan segala barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”.¹

¹ R.Subekti, R.Tjitrosudibio, *KUHPerdara*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001), h. 297.

Berdasarkan definisi tersebut dapat dikatakan, bahwa gadai merupakan perjanjian riil, yaitu perjanjian yang di samping kata sepakat, diperlukan suatu perbuatan nyata (dalam hal ini penyerahan kekuasaan atas barang gadai).²

Pada masa krisis, perum pegadaian mendapat peluang untuk semakin berperan dalam pembiayaan khususnya usaha kecil. Peran pembiayaan bagi masyarakat sesuai dengan tujuan perum pegadaian, di samping memupuk keuntungan, juga sebagai menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional.

Perum pegadaian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, hanya menyalurkan kredit kepada masyarakat dengan jaminan barang bergerak. Untuk menyalurkan kredit atau pinjaman uang yang jumlahnya tidak terlalu besar, dengan jaminan yang sederhana serta prosedurnya mudah, maka perum pegadaian tempat yang paling cocok. Pegadaian merupakan lembaga perkreditan yang ditujukan untuk mencapai tujuan dan sasaran serta pengaturan khusus. Tujuannya adalah mencegah rakyat kecil yang membutuhkan pinjaman agar tidak jatuh ke tangan para pelepas uang, yang dalam pemberian pinjaman mengenakan bunga sangat tinggi dan berlipat ganda.³

Perusahaan perum pegadaian, merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai,

² Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2001), h 88.

³ Fareid Wijaya M dan Soetatwo Hadiwigeno, *Lembaga-Lembaga Keuangan dan Bank, Perkembangan, Teori dan Kebijakan Edisi 2*, (Yogyakarta: BPFE, 1995), h. 372.

dalam rangka membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah.⁴ Pemerintah bermaksud juga untuk mengarahkan peranan dari Perum Pegadaian ketujuan yang lebih produktif, sesuai dengan tujuan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, yaitu meningkatkan taraf hidup manusia dan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, Perum Pegadaian berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

Dengan motto “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah” Perum Pegadaian berusaha memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat yang membutuhkan tanpa meninggalkan ciri khusus dan misi utamanya yaitu turut menunjang dan melaksanakan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya dengan cara penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai.

Memperjanjikan suatu jaminan kebendaan, seperti memperjanjikan gadai atau hipotik dan jaminan kebendaan lainnya, pada intinya adalah melepas sebagian dari kekuasaan seorang pemilik (pemberi gadai) atas barang gadai demi keamanan kreditur yaitu dengan mencopot kekuasaannya untuk memindah tangankan benda itu.⁵

Untuk sahnyanya suatu perjanjian gadai, pemberi gadai haruslah seorang yang berwenang menguasai bendanya. Benda itu bisa dipegang oleh kreditur penerima gadai yang selanjutnya disebut sebagai kreditur pemegang gadai atau oleh pihak ketiga, yaitu pihak ketiga pemegang gadai karena benda gadai

⁴ Rahmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 52.

⁵ R. Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 27.

ada ditangan pemegang gadai, seakan-akan benda gadai ada di dalam genggamannya pemegang gadai, jadi benda gadai pada dasarnya ada dalam kekuasaan pemegang gadai.⁶

Jika pemegang gadai beritikad baik, ia dilindungi terhadap pemberi gadai yang tidak berwenang menguasai itu. Ukuran dari itikad baik di sini ialah bahwa pemegang gadai adalah pemilik sebenarnya dan hak pemberi gadai itu tidak disangsikan.⁷ Kreditur mendapat perlindungan karena hak-hak tersebut kreditur akan merasa terjamin dalam pemenuhan piutangnya.

Dalam upaya untuk membantu pembiayaan dana untuk meningkatkan produktifitas atau pendapatan masyarakat yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan, maka tidak jarang ada nasabah (debitur) yang melakukan wanprestasi. Untuk itu hal yang demikian ini pihak perum pegadaian sebagai kreditur oleh undang-undang yaitu menurut kitab undang-undang hukum perdata pasal 1150, diberi kewenangan untuk mengambil pelunasan dari barang gadai, yakni dengan melakukan parate eksekusi. Parate eksekusi disebut juga dengan “eksekusi sederhana” yang diatur dalam pasal 1155 KUHPdata. Melalui parate eksekusi, pemegang gadai dapat melaksanakan eksekusi atau penjualan barang-barang gadai tanpa perantaraan pengadilan, ataupun tanpa perlu meminta bantuan juru sita. Pemegang di sini dapat menjual atas kekuasaan sendiri atas objek gadai tersebut, apabila debitur wanprestasi terhadap

⁶ J. Satrio, *Hukum Jaminan Kebendaan Fidusia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), h. 9.

⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab Tentang Credit Verband, Gadai, dan fidusia*, (Bandung: Alumni, 1981), h. 59.

perjanjian pokoknya.⁸ Selain itu pihak perum pegadaian selama tidak menyalah gunakan barang gadai, nasabah (debitur) tidak berhak untuk menuntut pengembalian barang gadai.

Perum pegadaian menahan barang yang dijadikan jaminan gadai apabila debitur pada saat jatuh tempo hanya membayar bunganya, sehingga timbul hutang baru sampai dengan pelunasan hutang oleh nasabah. Hak yang demikian itu disebut hak retensi. Sedangkan hak retensi adalah hak yang diberikan kepada kreditur tertentu untuk menahan benda debitur sampai tagihan yang berhubungan dengan benda tersebut dilunasi.⁹

Peraturan-peraturan mengenai perum pergadain pertama kali diadakan pada tanggal 12 Maret 1901 dengan Stb No. 131 tahun 1901, berturut-turut diadakan dalam Stb No. 490 tahun 1905, Stb No. 64 tahun 1928, Stb No. 81 tahun 1928, Stb No. 266 tahun 1930 lembaga ini mendapat status sebagai jawatan, PP No. 178 tahun 1961 jawatan pegadaian menjadi perusahaan Negara, Kepres No. 180 tahun 1965, PP No. 7 tahun 1969, PP No. 10 tahun 1990 pegadaian di ubah menjadi perusahaan umum (perum), dan PP No. 103 tahun 2000 tentang perusahaan umum (perum).¹⁰

Perum pegadaian sebagai kreditur mempunyai kewenangan untuk melakukan eksekusi langsung terhadap benda yang menjadi jaminan kewenangan kreditur untuk melakukan penjualan atau pelelangan dari barang jaminan tersebut dapat terjadi melalui penjualan di muka umum karena adanya

⁸ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 218.

⁹ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak- Hak Kebendaan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), h. 22.

¹⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Op.cit*, h. 72.

janji terlebih dahulu. Terhadap pelaksanaan pelelangan ini terhadap ketentuan bahwa pelaksanaan eksekusi dan perjanjian penjaminan berdasarkan ketentuan yang harus melalui penjualan umum. Perum pegadaian tidak diperkenankan untuk menghimpun dana dengan mengeluarkan surat-surat berharga atau sekuritas dan tidak diperkenankan memberi pinjaman dalam jangka menengah atau panjang.¹¹

Di Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota jenis pinjaman di bagi menjadi delapan golongan, yaitu untuk golongan A, B1, B2, B3, C1, C2, C3, dan D, waktu kredit semua golongan selama 120 hari atau 4 bulan, untuk lebih jelasnya mengenai beberapa besarnya uang pinjaman untuk masing-masing golongan, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

TABEL I
TENTANG PENGGOLONGAN UANG PINJAMAN, BESAR
BUNGA, DAN JANGKA WAKTU PINJAMAN

gol	Besar uang pinjaman	Sewa modal per 15 hari	Maksimum hari kredit
A	Rp 50.000 - Rp 500.000	0,75% max 9%	120 hari/4 bulan
B1	Rp 550.000 - Rp 1.000.000	1,15% max 9%	120 hari/4 bulan
B2	Rp 1.050.000 - Rp 2.500.000	1,15% max 9%	120 hari/4 bulan
B3	Rp 2.550.000 - Rp 5.000.000	1,15% max 9%	120 hari/4 bulan
C1	Rp 5.100.000 - Rp 10.000.000	1,15% max 9%	120 hari/4 bulan
C2	Rp 10.100.000 - Rp 15.000.000	1,15% max 9%	120 hari/4 bulan

¹¹ Faried Widjaya M dan Soetatwo Hadiwigeno, *Op.cit*, h. 373.

C3	Rp 15.100.000 - Rp 20.000.000	1,15% max 9%	120 hari/4 bulan
D	Rp 20.100.000 – ke atas	1% max 9%	120 hari/4 bulan

Sumber data : Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota

Sedangkan pelaksanaan perjanjian kredit gadai di perum pegadaian cabang pekanbaru kota dimulai setelah syarat-syaratnya dipenuhi oleh nasabah atau debitur yang meliputi :

1. Fotokopi KTP atau tanda kartu pengenalan lainnya (SIM, Paspor)
2. Barang jaminan yang memenuhi persyaratan
3. Surat kuasa dari pemilik barang yang dikuasakan
4. Mengisi formulir permintaan kredit
5. Menandatangani perjanjian kredit (SBK).

Mengenai produk-produk yang ada di perum pegadaian cabang pekanbaru kota yang sudah tersedia hingga saat ini diantaranya kredit cepat aman (KCA), kredit angsuran sistem gadai (KRASIDA), kredit angsuran fidusia (KREASI), kredit tunda jual komoditas pertanian (KTJG), kredit usaha rumah tangga (KRISTA), gadai syariah (RAHN), kredit perumahan swadaya (KREMADA), pegadaian jasa taksiran dan pegadaian jasa titipan.

Keberadaan perum pegadaian juga turut mencegah praktek pegadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Penyaluran uang pinjaman tersebut dilakukan dengan cara mudah, cepat, aman, dan hemat.

Berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji penelitian ini dengan judul :

**”PELAKSANAAN PENAHANAN BENDA GADAI TERHADAP
BENDA MILIK DEBITUR OLEH PERUM PEGADAIAN APABILA
DEBITUR WANPRESTASI”.**

(studi kasus perum pegadaian cabang pekanbaru kota)

B. Batasan masalah

Dalam penulisan suatu karya ilmiah perlu sekali diadakan suatu pembatasan terhadap permasalahan yang akan dibahas. Agar penelitian ini dapat mencapai pada sasaran yang di inginkan dengan benar dan cepat maka penulis membatasi permasalahan ini pada pelaksanaan penahanan benda gadai oleh perum pegadaian apabila debitur wanprestasi.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirangkum suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tindakan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota apabila debitur wanprestasi?
2. Apakah kendala- kendala yang dihadapi oleh Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota dalam pelaksanaan penahanan benda gadai?
3. Bagaimana penyelesaian terhadap kendala yang dihadapi oleh Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota?

D. Tujuan penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui tindakan dan akibat hukum dari debitur yang wanprestasi oleh perum pegadaian cabang pekanbaru kota

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh perum pegadaian cabang pekanbaru kota dalam pelaksanaan benda gadai.
3. Untuk mengetahui penyelesaian terhadap kendala yang dihadapi oleh Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota.

E. Manfaat penelitian

Manfaat yang hendak diraih dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama perkuliahan.
2. Untuk memberikan masukan kepada peneliti-peneliti berikutnya yang bermaksud untuk melakukan penelitian dengan permasalahan dalam penelitian ini.
3. Untuk memberikan tambahan referensi kepustakaan dan sumbangan penulis terhadap almamater Universitas Islam Negeri khususnya Fakultas Hukum serta kepada para pembaca.
4. Untuk menambah pengetahuan dan pemikiran tentang pelaksanaan penahanan benda gadai terhadap benda milik debitur oleh perum pegadaian apabila debitur wanprestasi.

F. Metode penelitian

Untuk memperoleh data sampai penarikan kesimpulan dari penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yang diuraikan antara lain sebagai berikut :

1. Jenis dan sifat penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian langsung kelapangan.

Apabila ditinjau dari sifatnya, maka penelitian ini dikategorikan di dalam penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan secara jelas dan konkrit tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penahanan benda gadai terhadap benda milik debitur oleh perum pegadaian apabila debitur wanprestasi.

2. Lokasi penelitian

Sesuai dengan judul yang penulis pilih dalam penelitian ini, maka penulis mengambil lokasi penelitian adalah dilakukan di wilayah hukum kota Pekanbaru, tepatnya di Perusahaan Umum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota. Dengan adanya Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota tersebut sehingga memudahkan masyarakat yang ingin menggunakan jasa gadai untuk memperoleh pinjaman setiap saat diperlukan.

3. Populasi dan sampel

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah nasabah atau debitur Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota untuk tahun 2012 berjumlah 100 orang, penulis tidak melakukan penelitian secara sensus tetapi menggunakan metode sampel dengan alasan nasabah atau debitur yang melakukan wanprestasi hanya berjumlah 20 orang yakni 20%. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka penulis menentukan atau istilah ini disebut dengan *porposive sampling*.

Penulis juga menjadikan pihak Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota yang diwakili oleh pimpinan cabang Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota sebanyak 1 orang serta manajer fidusia dan jasa lainnya sebanyak 1 orang, sebagai sumber data pendukung untuk melengkapi data penelitian ini.

4. Jenis dan Sumber data

Dalam penelitian ini ada 2 jenis data yang digunakan oleh peneliti antara lain :

- a. Data primer, yaitu Data yang diperoleh dari responden pada waktu melakukan penelitian dilapangan, melalui penyebaran angket dan Tanya jawab langsung dengan pimpinan cabang dan manejer Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota.
- b. Data skunder, yaitu Data yang diperoleh dengan cara membaca buku-buku, peraturan perundangan yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti dan data-data yang telah diperoleh selanjutnya dipergunakan sebagai landasan teori dalam pembahasan masalah yang diteliti.

5. Metode pengumpulan data

Dalam usaha untuk mendapatkan data yang lengkap, maka penulis menggunakan metode :

- a. Pengamatan (observasi)

Yaitu mengadakan pengamatan langsung dilapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang kegiatan penahanan

benda gadai terhadap benda milik debitur oleh perum pegadaian apabila debitur wanprestasi.

b. Wawancara

Yaitu pengumpulan data dengan cara Tanya jawab secara langsung dengan para responden yaitu pimpinan Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota, Manajer fidusia dan nasabah.

c. Angket

Yaitu merumuskan sejumlah pertanyaan yang dibuat agar dijawab oleh responden sehingga diperoleh data yang kuat. Adapun responden dalam penelitian ini adalah nasabah perum pegadaian cabang pekanbaru kota yakni nasabah atau debitur yang melakukan wanprestasi.

d. Kajian pustaka

Yaitu metode pengumpulan data digunakan peneliti dalam mencari dan mengumpulkan data-data yang mendukung dan menguatkan penelitian yang diadakan. Metode ini dilakukan dengan mengkaji berbagai literature yang mendukung dan berkaitan dengan objek penelitian.

6. Analisis data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah semua data berhasil dikumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

G. Sistematika penulisan

Untuk memudahkan uraian dalam penulisan ini lebih jelas dan mudah dipahami pembahasan dalam penelitian ini, penulis menyusunnya dalam empat bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Yang terdiri dari: Latar belakang masalah, Batasan masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Kerangka pemikiran, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Yang terdiri dari: Sejarah Perum pegadaian, Visi dan Misi Perum Pegadaian, Budaya Perusahaan, Struktur Organisasi Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota dan Jenis Produk Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota.

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG GADAI

Yang terdiri dari: Pengertian Gadai, Tahapan-Tahapan Pembebanan Jaminan Gadai, Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai, Hapusnya Gadai serta Wanprestasi

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Yang terdiri dari: Tindakan Yang Di Lakukan Oleh Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota Apabila Debitur Wanprestasi, Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota Dalam Pelaksanaan Penahanan Benda Gadai dan

Penyelesaiannya Terhadap Kendala Yang Dihadapi Oleh Perum
Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota.

BAB V PENUTUP

Yang terdiri dari: Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Ringkas Perusahaan Umum Pegadaian

Bentuk Usaha Pegadaian Berawal dari Bank Van leening pada masa VOC yang memberikan pinjaman uang kepada Masyarakat dengan jaminan Gadai. Untuk pertama kalinya, pada tanggal 12 Maret 1901, melalui Stb.1901 No.131, direalisasi sebuah jawatan Pegadaian di Sukabumi, kemudian dengan Stb.1903 No.266, lembaga ini mendapatkan status Jawatan.

Selanjutnya pada masa Pemerintahan RI. Jawatan diubah menjadi Perusahaan Negara Pegadaian berdasarkan Peraturan Pemerintah RI tahun 1961 No.178 tanggal 3 mei 1961. Dalam perkembangan selanjutnya, Perusahaan Negara Pegadaian mengadakan penyesuaian bentuk usahanya sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang RI No.9 tahun 1969 yang mengganti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 1969 tentang bentuk-bentuk Usaha Negara. Undang-Undang ini menetapkan bentuk perusahaan-perusahaan Negara menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan). Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan (Persero).

Bentuk usaha tersebut, maka Perusahaan Negara Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian berdasarkan Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1969 tanggal 11 maret 1969 tentang perubahan kedudukan Perusahaan Negara Pegadaian menjadi Jawatan Pegadaian (lembaran Negara RI tahun 1969 No.9).

Dalam rangka meningkatkan Efisiensi dan produktivitasnya, maka Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, berdasarkan PP No. 10 Tahun 1990 yang diperbaharui dengan PP No. 103 Tahun 2000 berubah menjadi Perusahaan Umum (PERUM) hingga sekarang. Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian dinyatakan bubar, tetapi segala hak dan kewajiban, kekayaan, pegawai yang dimiliki Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian dialihkan kepada Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1990 pasal 5 butir 1 dan 2 dinyatakan, bahwa sifat dan tujuan Perum Pegadaian adalah menyediakan pelayanan bagi masyarakat umum, dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat dan bertujuan untuk:

- a. Turut melaksanakan dan menjunjung pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjam atas dasar hukum pinjaman atas dasar hukum gadai.
- b. Mencegah praktik ijon, perdagangan gelap, riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

B. Visi dan Misi Perusahaan Umum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota

Adapun visi dan misi perusahaan umum pegadaian cabang pekanbaru kota yaitu :

Visi

Pada tahun 2013 pegadaian menjadi "*Champion*" dalam pembiayaan mikro dan kecil berbasis gadai dan fiducia bagi masyarakat menengah kebawah.

Misi

1. Membantu program pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah kebawah dengan memberikan solusi keuangan yang terbaik melalui penyaluran pinjaman kepada usaha mikro dan kecil.
2. Memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dan melaksanakan tata kelolah perusahaan yang baik secara konsisten.
3. Melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya.

C. Budaya Perusahaan Umum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi perusahaan, perum pegadaian telah memiliki **INTAN** sebagai nilai-nilai budaya perusahaan yang dijabarkan kedalam **10 Prilaku Utama** dan harus dihayati serta dijalankan secara konsisten dalam keseharian oleh seluruh jajaran insane perum pegadaian.

Nilai Budaya	Perilaku Utama
Inovatif	1. Berinisiatif, kreatif, dan produktif 2. Berorientasi pada solusi
Nilai Moral Tinggi	3. Taat beribah 4. Jujur dan berpikir positif
Terampil	5. Kompeten di bidangnya 6. Selalu mengembangkan diri
Adil Layanan	7. Peka dan cepat tanggap 8. Empatik, santun dan ramah
Nuansa Citra	9. Memiliki sense of belonging 10. Peduli nama baik perusahaan

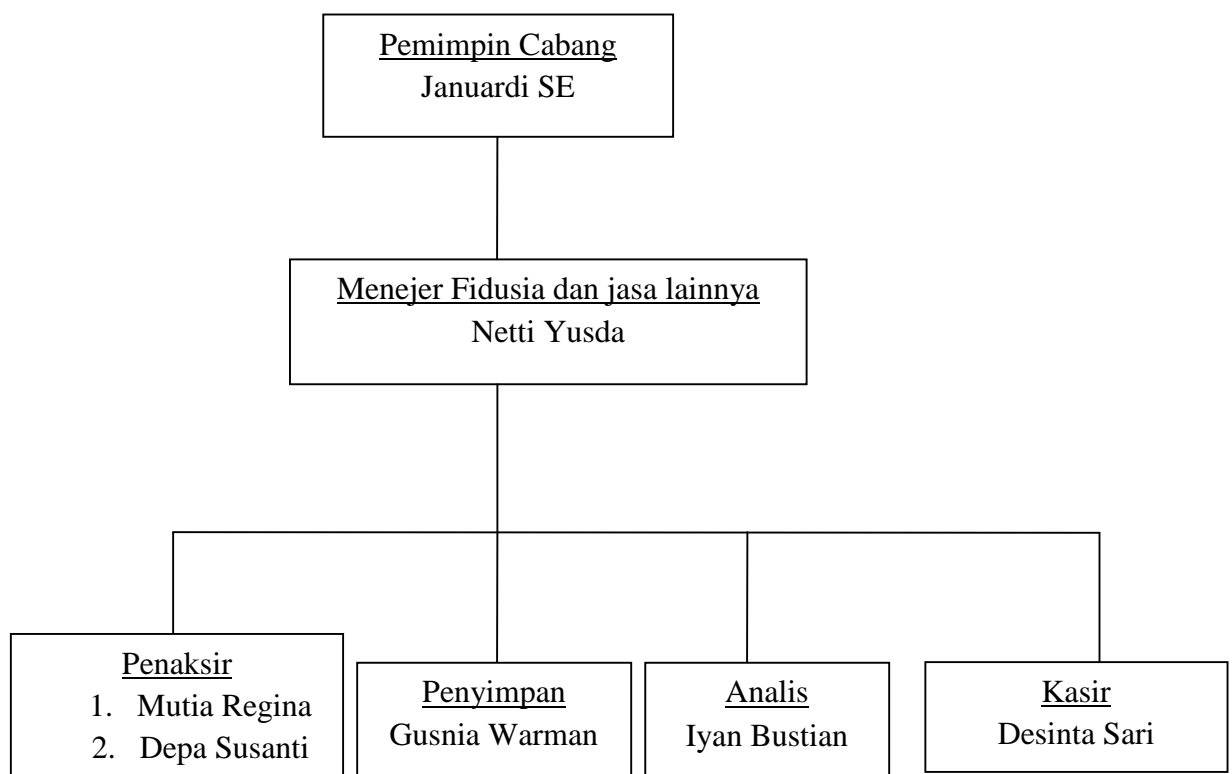
D. Struktur Organisasi Perum Pegadain Cabang Pekanbaru Kota

Dalam pengertian status organisasi merupakan suatu wadah dan tempat kerjasama untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sedangkan organisasi dalam pengertian dinamis adalah suatu proses kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Organisasi yang baik adalah suatu organisasi yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip organisasi yang meliputi perumusan tujuan, pembagian kerja, pendelegasian wewenang, adanya koordinasi, efisiensi dan pengawasan

umum. Demikian juga halnya perum pegadaian, memiliki struktur organisasi agar perusahaan dapat terkoordinasi secara baik, baik ditingkat pusat maupun cabang.

Struktur Organisasi Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota



Sumber : Dokumen Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota

Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota merupakan salah satu unit operasional dari seluruh cabang Perum Pegadaian yang ada di Indonesia, yang termasuk dalam Kantor Daerah II Perusahaan Umum Pegadaian Padang. Adapun dasar hukum berdirinya Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota adalah Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 66 Tahun 1987 tanggal 31 Januari 1987, dalam bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) dan mulai beroperasi

pada tanggal 12 April 1988. Berdasarkan PP No. 10 Tahun 1990 yang diperbaharui dengan PP No. 103 Tahun 2000 tentang perubahan bentuk Perjan Pegadaian menjadi Perum Pegadaian hingga sekarang. Maka Perjan Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota berubah pula menjadi Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota.

E. Jenis Produk Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota

Produk Perum pegadaian cabang pekanbaru kota diantaranya :

1. Kredit Cepat Aman (KCA)

Kredit KCA adalah pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang mudah, aman dan cepat. Dengan usaha ini pemerintah melindungi rakyat kecil yang tidak memiliki akses ke dalam perbankan. Jaminannya berupa benda bergerak, perhiasan emas dan berlian, elektronik kendaraan, maupun alat rumah tangga lainnya. Jangka waktu kredit maksimum 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang hanya dengan membayar sewa modalnya saja.

2. Kredit Angsuran Sistem Gadai (KRASIDA)

Kredit angsuran sistem gadai merupakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro kecil atas dasar gadai yang pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran.

3. Kredit Angsuran Fidusia (KREASI)

kredit angsuran fidusia merupakan pemberian pinjaman kepada pengusaha mikro kecil atas dasar gadai yang pengembalian pinjamannya dilakukan

melalui angsuran. Pengurusannya mudah dan pasti serta fleksibel dalam menentukan jangka waktu pembelian sesuai keinginan nasabah.

4. Kredit Tunda Jual Komoditas Pertanian (KTJG)

Diberikan kepada para petani dengan jaminan gabah kering giling. Layanan kredit ini ditunjukan untuk membantu para petani pasca panen supaya terhindar dari tekanan akibat fluktuasi harga pada saat panen.

5. Kredit Usaha Rumah Tangga (KRISTA)

Pemberian pinjaman kepada pengusaha mikro kecil atas dasar gadai yang pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran dengan tanpa anggunan serta bersifat tertulis dan terikat.

5. Gadai Syariah (RAHN)

Produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dengan mengacu pada sistem administrasi modern.

1. Kredit Perumahan Swadaya (KREMADA)

Diberikan kepada semua orang yang membutuhkan dana guna merenovasi rumah tempat tinggal mereka dengan tanpa jaminan sama sekali.

2. Jasa Taksiran

Suatu pelayanan kepada masyarakat yang peduli dengan harga dan nilai harta benda miliknya. Dengan biaya yang relative ringan masyarakat dapat mengetahui kualitas barang miliknya secara pasti. Juru taksir yang berpengalaman dapat melakukan penaksiran barang secara obyektif.

3. Jasa Titipan

Untuk menjamin rasa aman dan ketenangan masyarakat luas akan harta simpanannya, terutama yang akan meninggalkannya untuk jangka waktu yang cukup lama. Perum pegadaian memberikan jasa layanan jasa penitipan barang-barang berharga dengan prosedur yang sangat mudah dan biaya yang sangat terjangkau,

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG GADAI

A. Pengertian Gadai

Lembaga gadai menurut KUHPdata ini masih banyak dipergunakan di dalam praktek. Kedudukan pemegang gadai lebih kuat dari pemegang jaminan fidusia, karena benda yang menjadi jaminan berada dalam kekuasaan kreditur. Dalam ini kreditur terhindar dari itikad jahat pemberi gadai, sebab dalam gadai benda jaminan sama sekali tidak boleh berada dalam penguasaan pemberi gadai.

Mengenai ketentuan tentang gadai ini diatur dalam KUHPdata Buku II Bab XX pasal 1150 sampai pasal 1160. Sedangkan pengertian gadai itu sendiri diatur dalam pasal 1150 KUHPdata berbunyi sebagai berikut:

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang untuk berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang berutang atau seseorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan segala barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.¹

Dari pengertian tersebut diatas maka unsur-unsur atau elemen pokok gadai yaitu :

1. Gadai adalah jaminan untuk pelunasan utang.

¹ R.Subekti, R.Tjitrosudibio, *Op.cit*, h 297.

2. Gadai memberikan hak didahulukan atau hak preferent pelunasan hutang kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lainnya.
3. Obyek gadai adalah barang bergerak.
4. Barang bergerak yang menjadi obyek gadai tersebut diserahkan kepada kreditur (dalam kekuasaan kreditur).²

Gadai terjadi apabila debitur atau pemberi gadai menyerahkan benda bergerak sebagai jaminan kepada si kreditur atau pemegang gadai dan kreditur diberi kekuasaan untuk mengambil pelunasan dengan menjual barang jaminan itu apabila debitur wanprestasi. Gadai sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir* artinya hak gadai tergantung pada perjanjian pokok, misalnya perjanjian kredit. Yang dimaksud perjanjian pokok yaitu perjanjian antara pemberi gadai atau debitur dengan pemegang gadai atau kreditur yang membuktikan kreditur telah memberikan pinjaman kepada kreditur yang di jamin dengan gadai.³

Dalam KUHPdata tentang bentuk perjanjian tidak disyaratkan apa-apa. Maka dapat disimpulkan bahwa bentuk perjanjian gadai adalah bebas tidak terikat oleh suatu bentuk tertentu artinya dapat diadakan secara lisan maupun tertulis. Perjanjian kredit ini dibuat dengan akta dibawah tangan atau dengan akta outentik. Jadi jaminan gadai baru lahir setelah ada perjanjian kredit.

Dari rumusan tentang pengertian gadai maka dapat disimpulkan tentang sifat-sifat umum gadai yaitu:

² Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Jakarta: Alfabeta, 2003), h 228.

³ *Ibid*, h 228.

1. Gadai adalah hak kebendaan

Dalam KUHPerdara sifat kebendaan ini dapat diketahui dari pasal 1152 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi :

“hak gadai hapus, apabila barangnya gadai keluar dari kekuasaan si pemberi gadai. Apabila, namun itu barang tersebut hilang dari tangannya penerima gadai ini atau dicuri dari padanya maka berhaklah ia menuntutnya kembali sebagai mana disebutkan dalam pasal 1977 ayat kedua, sedangkan apabila barangnya gadai didapatkan kembali, hak gadai dianggap tidak pernah hilang”⁴

Oleh karena itu hak gadai mengandung hak revindikasi, maka hak gadai merupakan hak kebendaan sebab revindikasi merupakan ciri khas dari hak kebendaan. Tujuan sifat kebendaan disini ialah untuk memberikan jaminan bagi pemegang gadai bahwa dikemudian hari piutangnya pasti dibayar dari nilai jaminan.⁵

Sekalipun dikatakan bahwa hak gadai merupakan hak kebendaan, tetapi hak gadai di sini berbeda dengan hak gadai seperti hak milik, hak postal dan lain-lain, yang merupakan hak-hak yang bersifat memberikan kenikmatan kepada yang mempunyainya. Di sini hak kebendaan jaminan yang dikaitkan (*accessoir*) pada hak pribadi.⁶

2. Hak gadai bersifat *accessoir*

Jaminan gadai mempunyai sifat *accessoir* (perjanjian tambahan) artinya jaminan gadai bukan merupakan hak yang berdiri sendiri tetapi keberadaannya tergantung perjanjian pokok. Hak gadai merupakan tambahan

⁴ R.Subekti, R.Tjitrosudibio, *Op.cit*, h 297.

⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Op.cit*, h 57.

⁶ J. Satrio, *Op-cit*, h 109.

(*accessoir*) saja dari perjanjian pokoknya yaitu berupa perjanjian pinjam uang, jadi ada atau tidak adanya hak gadai tergantung dari ada atau tidaknya piutang yang merupakan perjanjian pokoknya. Dengan demikian hak gadai akan hapus jika perjanjian pokoknya hapus. Beralihnya piutang membawa serta beralihnya hak gadai, hak gadai berpindah kepada orang lain bersama-sama piutang yang dijamin dengan hak gadai tersebut, sehingga hak gadai tidak mempunyai kedudukan yang berdiri sendiri melainkan *accessoir* terhadap perjanjian pokoknya. Perjanjian pinjam utang atau kredit dapat dibuat dengan akta dibawah tangan atau akta outentik.

3. Hak gadai tidak dapat dibagi-bagi

Hak gadai tidak dapat dibagi-bagi, maka dengan dibayarnya sebagian hutang tidak akan membebaskan sebagian dari benda gadai. Hak gadai tetap melekat untuk seluruh bendanya.

4. Hak gadai adalah hak yang didahulukan (hak preferent)

Dapat diketahui dalam pasal 1133 dan pasal 1150 KUHPerdara. Pemegang gadai mempunyai hak yang didahulukan terhadap kreditur lain artinya apabila debitur cidera janji atau wanprestasi maka ia mempunyai hak untuk menjual jaminan gadai tersebut dan hasil penjualannya digunakan untuk melunasi hutangnya. Apabila terhadap kreditur lain yang juga memiliki tagihan kepada debitur tersebut, kreditur belakangan ini tidak akan mendapat pelunasan sebelum kreditur yang pertama mendapat pelunasan (*droit de preference*).

5. Hak gadai adalah hak yang kuat dan mudah penyitaannya atau eksekusinya.

Dalam pasal 1134 ayat (2) KUHPdata dinyatakan bahwa "Hak gadai dan hipotik lebih diutamakan dari pada previlage, kecuali jika undang-undang menentukan sebaliknya."⁷

Dari bunyi pasal tersebut jelas bahwa hak gadai mempunyai kedudukan yang kuat. Pemegang gadai berhak menjual sendiri benda gadai dalam hal debitur wanprestasi. Jaminan gadai mempunyai kekuatan eksekutorial, sehingga penjualan dapat dilakukan tanpa perantara hakim. Penjualan harus dilakukan dimuka umum dengan cara pelelangan dan bila hasil lelang telah mencukupi hutangnya serta terdapat kelebihan uang maka sisanya dikembalikan kepada debitur. Hak itu juga berlaku dalam hal pemberi gadai atau debitur pailit berdasarkan pasal 1155 ayat (1) KUHPdata.

B. Tahap-tahap Pembebanan Jaminan Gadai

Tahap-tahap pembebanan gadai adalah rangkaian perbuatan hukum dari dibuatnya perjanjian pokok sampai pembuatan akta gadai, ada tiga tahap yaitu:

1. Tahap pertama adalah pembuatan perjanjian kredit.

Tahap pertama adalah perjanjian hutang (kredit). Undang-undang tidak menentukan bentuk formal dari perjanjian kredit itu sehingga kreditur dan debitur bebas membuat perjanjian kredit dengan akta dibawah tangan atau akta notaris.⁸

⁷ *Ibid*, h 297.

⁸ Sutarno, *Op.cit*, h 231.

Oleh pasal 1151 KUHPerdara disebutkan bahwa persetujuan gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperoleh bagi pembuktian persetujuan pokok.⁹

Dari rumusan ini dapat disimpulkan bahwa bentuk perjanjian gadai tidak terikat, asal saja memenuhi syarat sahnyanya suatu perjanjian sebagaimana pasal 1320 KUHPerdara.

Dalam perjanjian kredit harus dirumuskan hutang yang pelunasannya dijamin dengan gadai. Perjanjian ini bersifat konsensual, obligatoir. Perjanjian ini merupakan title dari perjanjian gadai.¹⁰

2. Tahap kedua adalah pembuatan akta gadai

Tahap kedua pembebanan benda dengan jaminan dengan jaminan gadai yang ditandai dengan akta gadai, ditandatangani kreditur sebagai penerima gadai dengan debitur sebagai pemberi gadai atau pihak ketiga (bukan debitur) sehingga pemberi gadai. Undang-undang tidak menentukan formalitas atau bentuk tertentu dari akta gadai sehingga akta gadai dapat dibuat dengan akta dibawah tangan atau dengan akta uotentik. Dalam akta gadai harus diuraikan mengenai benda yang menjadi obyek gadai secara jelas dan rinci meliputi identifikasi benda tersebut mengenai namanya, mereknya, tahun pembuatannya, jumlahnya, kesatuan berat, kualitas, jenis, ukuran nilainya, dan identifikasi lainnya.¹¹

⁹ R.Subekti, R.Tjitrosudibio, *Op.cit*, h 297.

¹⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Op.cit*, h 58.

¹¹ Sutarno, *Op.cit*, h 232.

3. Tahap ketiga

Tahap yang paling penting dalam gadai adalah benda yang digadaikan harus ditarik dari kekuasaan pemberi gadai atau debitur dan kemudian benda yang digadaikan berada dalam kekuasaan kreditur sebagai pemegang atau penerima gadai. Penyerahan itu harus nyata, tidak boleh hanya berdasarkan pernyataan dari debitur, sedangkan benda itu berada dalam kekuasaan debitur itu. Penyerahan didalam penguasaan pemegang gadai merupakan syarat esensial maka tidak sah jika benda itu tetap berada dalam kekuasaan pemberi gadai atau debitur.

Syarat penarikan benda yang digadaikan ini dari kekuasaan pemberi gadai tentu menyulitkan debitur atau pemberi gadai karena benda yang digadaikan itu justru benda yang sangat diperlukan oleh debitur untuk mencari nafkah atau menjalankan usahanya. Hak gadai hapus apabila barang gadai keluar dari kekuasaan penerima gadai, kecuali jika barang itu hilang atau dicuri orang.

Apabila barang gadai tetap berada dibawah kekuasaan debitur atau pemberi gadai maka tidak atau belum terjadi gadai. Kalaupun perjanjian gadai telah dilaksanakan maka hak gadai itu tidak sah.¹²

Ancaman tidak sahnya suatu gadai dapat dikemukakan pada pasal 1152 ayat (2) KUHPerdara yang berbunyi :

”Tak sahnya adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berutang atau si pemberi gadai, ataupun yang kembali atas kemauan si berpiutang.”

¹² *Ibid*, h 233.

C. Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Gadai

Selama gadai berlangsung pemberi dan pemegang gadai tidak lepas dari hak dan kewajiban masing-masing sebagai bentuk pertanggung jawaban atas benda gadai.

a. Hak dan kewajiban pemberi gadai yaitu :

Hak-hak pemberi gadai :

1. Ia berhak untuk menuntut apabila barang gadai itu telah hilang atau mundur sebagai akibat dari kelalaian pemegang gadai.
2. Ia berhak untuk mendapat pemberitahuan terlebih dahulu dari pemegang gadai apabila barang gadai akan dijual.
3. Ia berhak mendapat kelebihan atas penjualan barang gadai setelah dikurangi dengan pelunasan hutangnya.
4. Ia berhak mendapat kembali barang yang digadaikan apabila hutangnya di bayar lunas.

Kewajiban pemberi gadai :

1. Ia berkewajiban menyerahkan barang yang dipertanggungkan sampai pada waktu hutang dilunasi, baik mengenai jumlah pokok maupun bunga.
2. Ia bertanggungjawab atas pelunasan hutangnya, terutama dalam hal penjualan barang yang digadaikan.
3. Ia berkewajiban memberikan ganti kerugian atas biaya yang telah dikeluarkan oleh pemegang gadai untuk menyelamatkan barang yang digadaikan.

4. Apabila telah diperjanjikan sebelumnya, ia harus menerima jika pemegang gadai menggadaikan lagi barang yang digadaikan tersebut.¹³

b. Hak pemegang gadai yaitu :

1. Menjual dengan kekuasaan sendiri (*parata eksekusi*)

Yang dimaksud *parata eksekusi* yaitu wewenang yang diberikan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutang dari kekayaan debitur, tanpa memiliki eksekutorial title. Dalam hal pemberi gadai melakukan wanprestasi, tidak memenuhi kewajiban setelah jangka waktu yang ditentukan itu telah terlampaui, apabila oleh semua pihak tidak ditentukan lain atau diperjanjikan lain atau tidak ditentukan sesuatu, maka pemberi piutang atau pemegang gadai berhak untuk menjual atas kekuasaan sendiri benda gadai.

Hak pemegang gadai ini tidak lain dari perjanjian yang secara tegas dinyatakan oleh para pihak akan tetapi demi hukum, kecuali diperjanjikan lain. Hak pemegang untuk menjual barang atas kekuasaannya sendiri ini tidak tunduk pada aturan umum tentang eksekusi yang diatur secara khusus.

Dalam gadai penjualan barang harus dilakukan dimuka umum, menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan berdasarkan atas syarat-syarat yang lazim berlaku, kemudian dari hasil penjualan tersebut diambil untuk melunasi hutang debitur, bunga, dan biasanya dikembalikan kepada debitur

¹³ Budi Untung, *Kredit Perbankan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Andi, 2000), h 89.

2. Hak menjual barang gadai dengan perantara hakim

Penjualan benda gadai untuk mengambil pelunasan dapat juga terjadi jika si berpiutang memuntut dimuka hakim supaya barang gadai dijual menurut cara yang ditentukan hakim untuk melunasi hutang beserta bunga dan biaya.

Hasil penjualan digunakan untuk melunasi hutang debitur. Jika terdapat kelebihan maka dikembalikan kepada debitur tetapi jika hasil penjualan tidak bisa digunakan melunasi hutang atau terdapat kekurangan maka hal tersebut menjadi tanggung jawab debitur.

Menjual benda gadai untuk mengambil pelunasan-pelunasan dapat pula terjadi jika si berpiutang menuntut dimuka hakim untuk melunasi hutang, bunga, beserta biaya pelelangan.

3. Atas izin hakim tetap menguasai benda gadai

Jika si berpiutang atau pemegang gadai dapat menuntut agar barang gadai tetap berada pada si pemegang gadai untuk suatu jumlah yang akan ditetapkan dalam vonis hingga sebesar piutangnya beserta bunga dan biaya.

4. Hak untuk mendapat ganti rugi

Pemegang gadai berhak untuk mendapat ganti rugi berupa biaya yang perlu dan berguna, yang telah dikeluarkan si berpiutang atau pemegang gadai untuk menyelamatkan benda gadai tersebut.

5. Hak retensi (*recht van terughouden*)

Selama pemegang gadai tidak menyalah gunakan barang yang diberikan dalam gadai maka si berpiutang tidak berkuasa menuntut pengembaliannya, sebelum ia membayar sepenuhnya baik uang pokok maupun bunga dan biaya hutangnya, yang untuk menjamin barang gadai telah diberikan beserta biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang-barang gadai.

6. Hak didahulukan (*recht van voorrang*)

Kreditur atau pemegang gadai mempunyai hak untuk didahulukan pemenuhan tagihan-tagihan lainnya, baik itu terhadap hutang pokok, bunga, dan biaya-biaya lainnya. Hak tersebut dapat dilihat dari kreditur atau pemegang gadai untuk menjual barang gadai atas kekuasaan pemegang gadai sendiri maupun melalui bantuan hakim. terhadap hak didahulukan ini ada pengendaliannya yaitu biaya lelang dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang gadai tersebut.¹⁴

c. Kewajiban pemegang gadai yaitu :

- a. Pemegang gadai bertanggung untuk hilangnya atau kemunduran harga barang gadai jika itu terjadi akibat kesalahan atau kelalaian kreditur.
- b. Kewajiban untuk memberitahukan kepada pemberi gadai jika barang gadai dijual.

¹⁴Mariam Darus Badruzaman, *Op.cit*, h 59.

- c. Pemegang gadai harus memberikan perhitungan tentang pendapatan dari penjualan barang gadai dan setelahnya ia mengambil pelunasan utangnya, harus menyerahkan kelebihannya kepada debitur.
- d. Ia harus mengembalikan barang gadai, apabila utang pokok, bunga, dan biaya untuk menyelamatkan barang gadai telah dibayar lunas.¹⁵

D. Hapusnya Gadai

Hak gadai hapus karena :

- a. Dengan hapusnya perikatan pokok yang dijamin dengan gadai ini sesuai dengan sifat *accessoir* dari gadai maka tergantung dari perjanjian pokoknya. Perikatan pokok harus dengan pelunasan, kompensasi, novasi dan pelunasan hutang.
- b. Dengan terlepasnya benda jaminan dari kekuasaan pemegang gadai tetapi pemegang gadai masih mempunyai hak untuk menuntut kembali dan kalau berhasil maka undang-undang menganggap perjanjian gadai tersebut tidak pernah putus.
- c. Dengan hapus atau musnahnya benda jaminan.
- d. Dengan dilepasnya benda gadai secara sukarela.
- e. Dengan percampuran yaitu dalam hal pemegang gadai menjadi pemilik barang gadai tersebut.¹⁶

¹⁵ Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h 18.

¹⁶ J. Satrio, *Op-cit*, h 146.

E. Wanprestasi

Dalam suatu perjanjian terdapat hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur. Kewajiban dari debitur adalah untuk memenuhi prestasi dan apabila ia tidak melaksanakan kewajiban atau kesepakatan yang harus ditaati oleh para pihak dan bukan karena keadaan memaksa menurut hukum debitur dianggap telah melanggar kesepakatan atau istilah lain adalah wanprestasi.

Pengertian wanprestasi atau *breach of contract*, menurut R. Subekti adalah “apabila siberutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikan maka ia dikatakan melakukan ”wanprestasi”, artinya debitur alpa atau lalai atau ingkar janji atau melanggar perjanjian apabila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan.”¹⁷

Sedangkan menurut Muhammad Yahya Harahap yang dimaksud wanprestasi adalah ”pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Seorang debitur disebut dalam keadaan wanprestasi apabila dia dalam melakukan pelaksanaan perjanjian telah lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya atau selayaknya.”¹⁸

Dalam praktek hukum dalam msyarakat untuk menentukan sejak kapan seorang debitur wanprestasi kadang-kadang tidak selalu mudah, karena kapan debitur harus memenuhi prestasi tidak selalu ditentukan dalam perjanjian. Dalam perjanjian yang prestasinya untuk memberi sesuatu atau untuk berbuat sesuatu yang tidak menetapkan kapan debitur harus memenuhi

¹⁷ R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Inter Masa, 1984), h 1.

¹⁸ Muhammad Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni, 1986), h

prestasi itu sehingga untuk pemenuhan prestasi tersebut debitur harus terlebih dahulu diberi teguran agar ia memenuhi kewajibannya.

Adapun bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dapat berupa 3 macam yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
2. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
3. Melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.¹⁹

Apabila debitur wanprestasi, kreditur dapat menuntut ganti kerugian dan pembatalan. Ketentuan ganti kerugian yang mengatur tentang perikatan-perikatan untuk memberikan sesuatu, tercantum dalam pasal 1236 KUHPerdara yang menetapkan :

”Si berhutang adalah wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan kebendaannya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya.”²⁰

¹⁹R. Subekti, *Op.cit*, h 45.

²⁰R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Op.cit*, h 323.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tindakan Yang Di Lakukan Oleh Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota Apabila Debitur Wanprestasi

Pada dasarnya masih ada berbagai kendala dan masalah yang biasanya dihadapi oleh Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota yaitu dalam hal debitur yang wanprestasi, akibat dari permasalahan tersebut tentu akan sangat mengganggu operasional dari kerja Perum Pegadaian tersebut. Akibatnya Perum Pegadaian akan mengalami kerugian, sehingga akan mengurangi aktiva atau pendapatan Perusahaan.

Perum pegadaian sebagai kreditur mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan langsung terhadap benda yang menjadi jaminan apabila debitur wanprestasi yakni benda yang digadaikannya tersebut tidak diambil sampai jangka waktu yang ditentukan yaitu secara lelang.

Pelaksanaan lelang dilaksanakan sendiri oleh oleh perusahaan umum pegadaian (Staatsblad tahun 1920 No. 133). Petunjuk pelaksanaan lelang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan No. 40 tahun 2006 tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Adapun pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Perum Pegadaian berlainan dengan apa yang dilakukan oleh kantor lelang Negara, tetapi tetap mengacu pada peraturan Menteri Keuangan No.40 tahun 2006 dan surat edaran dereksi pegadaian No.6 tahun 2001. Perum Pegadaian telah mempunyai kewenangan sendiri dalam melaksanakan lelang terhadap barang jaminan gadai dari nasabah atau debitur yg melakukan wanprestasi. Didalam

aturan dasar pegadaian (ADP), maka perum pegadaian berwenang untuk melaksanakan lelang dalam lingkungan perum pegadaian itu sendiri.

Lelang adalah penjualan umum, yaitu penjualan barang-barang yang dilakukan kepada umum/ dihadapan orang banyak dengan harga penawaran yang meningkat kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan itu dan diberi kesempatan untuk menawar harga, serta menyetujui harga yang ditawarkan tersebut.¹

Lelang dilakukan nasabah sudah tidak mampu memperpanjang atau menebus barang yang digadaikan. Dilaksanakan setelah jatuh tempo 120 hari atau 4 bulan dari tanggal kredit. Dari hasil penjualan lelang setelah dikurangi biaya lelang yang menjadi hak pegadaian adalah uang pinjaman dan uang sewa modal sedangkan sisanya tetap menjadi hak nasabah. Biaya lelang dipungut langsung oleh pegadaian kemudian disetorkan langsung ke Negara. Jadi barang yang digadaikan sudah terlelang, nasabah tetap mempunyai hak atas sisa penjualan lelang yang disebut dengan uang kelebihan. Hak untuk mengambil uang kelebihan ini selama 1 tahun sejak dari tanggal lelang. Nasabah dapat mengambilnya dengan menyerahkan Surat Bukti Kredit (SBK) asli serta memperlihatkan bukti jati diri atau kartu identitas.

Untuk mengantisipasi agar meminimalkan tindakan wanprestasi oleh debitur maka pejabat pegadaian harus mengantisipasi sebagai berikut :

¹ F.X. Ngadijarno, Nunung Eko Laksito, dan Isti Indri Listiani, *Lelang Teori dan Praktik*, (Jakarta: BPPK, 2006), h 26.

Pejabat pegadaian mempunyai hak sebagai berikut :

1. Menolak benda yang digadaikan karena tidak boleh diterima sebagai benda gadai atau karena alasan yang tidak disebutkan oleh Undang-undang. Hal ini sebagaimana tersimpul dalam pasal 6 ayat 2 aturan dasar pegadaian.
2. Menetapkan jumlah maksimum uang pinjaman yang dapat diberikan.
3. Melelang benda gadai apabila jangka waktu maksimum pinjaman sudah habis, dan mengambil pelunasan dari hasil penjualan itu.
4. Menolak benda gadai oleh pejabat pegadaian dianggap sebagai benda yang diperoleh tidak menurut hukum.

Tindakan yang dilakukan perum pegadaian apabila debitur wanprestasi :

1. Dengan memakai hak pemegang gadai yang disebut pelaksanaan segara (*parate eksekusi*), penjualan dengan cara ini yang paling sering dilakukan oleh kantor pegadaian, cara ini ditempuh, menurut ketentuan setelah debitur diberitahukan tanggal lelang yang telah ditetapkan, tanggal lelang ditetapkan setelah tanggal jatuh tempo, biasanya tanggal lelang dan tanggal jatuh tempo telah dicantumkan di blanko perjanjian gadai.
2. Dengan meminta hakim agar penjualan barang yang digadaikan dilakukan dengan cara dan perantara hakim, selama ini tindakan penjualan dengan cara demikian sangat jarang dilakukan, kecuali terhadap barang-barang besar dengan nilai penjualan puluhan juta rupiah, namun pada umumnya dengan barang-barang besar demikian penjualan dilakukan oleh yang

bersangkutan sendiri, dengan menawarkan barang tersebut kepada keluarga atau teman-temannya.

3. Dengan izin hakim barang yang digadaikan tetap berada dan menjadi milik pemegang gadai dengan jumlah yang ditetapkan olehnya, dalam praktek pegadaian hal demikian tidak ditemukan, memang ada indikasi beberapa karyawan menjalankan bisnis membeli barang-barang gadai yang telah jatuh tempo, namun konteks tersebut di luar dari sistem pegadaian.
4. Dengan memperhitungkan bunga yang dihasilkan barang yang digadaikan dengan bunga yang terutang, memang memperhitungkan hasil penjualan barang gadai dengan bunga pokok penjualan menjadi dasar dari kebijakan perum pegadaian, namun dalam praktek aspek hukum ini tidak terselenggarakan, karena umumnya nasabah tidak banyak yang datang meminta pembayaran selisih hasil penjualan dengan bunga dan utang pokok, bahkan beberapa nasabah merasa lebih baik untuk tidak datang di pegadaian pasca lelang, karena khawatir penjualan barang lelang tidak menutupi biaya lelang, utang pokok dan bunga pinjaman, sehingga banyak nasabah menghindari datang ke pegadaian pasca lelang, padahal sebenarnya pegadaian telah menghitung bahwa antara harga penawaran lelang dengan harga jual akan selalu minimal sama dengan besar pinjaman pokok dan bunga.²

Nasabah atau debitur yang lalai memenuhi kewajibannya tentu ada faktor-faktor penyebabnya, maka akan diketahui hal-hal yang menyebabkan

² Bapak Januardi, Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota, *Wawancara*, Pekanbaru, 17 Desember 2012.

seorang nasabah wanprestasi. Baik disengaja atau tidak disengaja. untuk lebih jelasnya penulis menanyakan kepada responden melalui angket tentang “ Apa alasan nasabah tidak mengembalikan pinjaman sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan ?” Adapun jawabannya dapat dilihat dalam tabel berikut :

TABEL IV. 1
TENTANG FAKTOR-TAKTOR PENYEBAB NASABAH
WANPRESTASI

No	Jawaban responden	Jumlah	Persentase
1.	Lupa jika ada hutang	5	25%
2.	Sengaja tidak membayar	5	25%
3.	Ingat ada hutang uang tidak ada	10	50%
	Jumlah	20	100%

Sumber data : hasil penelitian tanggal 22 desember 2012

Berdasarkan tabel diatas hasilnya menyatakan bahwa tidak semua debitur melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan, dari 20 orang responden, 5 orang atau 25% menyatakan ia tidak melaksanakan kewajibannya karena lupa ada hutang pada perum pegadaian, 5 orang atau 25% mengatakan sengaja tidak membayar, dan 10 orang atau 50% mengatakan ingat ada hutang tetapi uang tidak ada untuk melunasinya.

Istilah wanprestasi dalam hukum perikatan dapat diartikan sebagai suatu kelalaian atau ingkar janji, bentuk wanprestasi itu adalah tidak

melakukan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi tetapi hanya sebagian, melaksanakan prestasi tetapi terlambat, melaksanakan prestasi namun tidak sebagaimana mestinya.³

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pimpinan cabang Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota dengan Bapak Januardi, penulis menyajikan pertanyaan “ Kapan Nasabah atau debitur dikatakan wanprestasi ? “adapun jawaban beliau seorang nasabah atau debitur dapat dikatakan wanprestasi apabila debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya berupa pengembalian kredit beserta bunga dan biaya lainnya sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dan telah pula disepakati oleh debitur.⁴

Mengenai batas waktu pengembalian kredit penulis menanyakan kepada responden, melalui angket yang disebarkan tanggal 22 desember 2012 dengan pertanyaan “ Berapa lama waktu yang diberikan untuk mengembalikan pinjaman tersebut ? “ adapun jawabannya dapat dilihat dalam tabel berikut :

TABEL IV .2

TENTANG BATAS WAKTU PENGEMBALIAN KREDIT

No	Jawaban responden	Jumlah	Persentase
1.	Tiga Bulan	1	5%
2.	Empat Bulan	17	85%
3.	Lima Bulan	2	10%

³ Abdul Thalib dan Admiral, *Hukum Keluarga dan Perikatan*, (Pekanbaru: UIR Pres, 2008), h 171.

⁴ Bapak Januardi, Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota, *Wawancara*, Pekanbaru, 17 Desember 2012.

	Jumlah	20	100%
--	--------	----	------

Sumber data : hasil penelitian tanggal 22 desember 2012

Apabila dilihat dari tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa batas waktu pengembalian kredit yaitu antara 3 sampai 5 bulan dan di dalam surat bukti kredit (SBK), sebenarnya bahwa batas waktu pengembalian kredit adalah 120 hari atau 4 bulan untuk semua jenis pinjaman. Jika dalam waktu tersebut belum dilunasi, maka barang tersebut akan dilelang oleh pihak Perum Pegadaian.

Pada dasarnya lelang ini dilakukan karena debitur telah melakukan wanprestasi, yaitu setelah jatuh tempo tidak membayar hutang-hutangnya, atau dicicil, atau tidak juga memperpanjang kreditnya. Oleh karena itu perusahaan umum pegadaian akan melelang barang jaminan gadai tersebut pada tanggal yang telah ditentukan sebelumnya guna melunasi hutang si nasabah. Dalam KUHPerdara, masalah lelang diatur dalam pasal 1154 dan pasal 1155 KUHPerdara.

Pelaksanaan lelang pada Perusahaan Umum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota dilakukan dengan cara :

1. Pemberitahuan lelang

Setiap kantor cabang diwajibkan mengirim daftar tanggal lelang untuk tahun anggaran berikutnya ke kantor daerah masing-masing. Pemberitahuan lelang mengenai tanggal pelaksanaan lelang diumumkan melalui :

- a. Papan pengumuman yang ada di kantor yang bersangkutan
- b. Melalui media informasi, yaitu seperti surat kabar, radio, telepon, dll

- c. Pemberitahuan oleh pegawai loket kepada nasabah
- d. Pemberitahuan tertulis kepada nasabah
- e. Pemberitahuan tertulis dilakukan paling lambat 15 hari sebelum pelaksanaan lelang dilaksanakan
- f. Barang jaminan yang akan dilelang dihitung 120 hari dari tanggal jatuh tempo kredit. Maksudnya, jarak antara tanggal kredit dengan tanggal jatuh tempo itu harus cukup 120 hari tidak lebih atau kurang (4 bulan). Kemudian lelangnya akan dilaksanakan pd 5-10 hari setelah tanggal jatuh tempo (sesuai dengan tanggal lelang yang tertera pada SBK)

Pada kenyataanya dilapangan yaitu tentang pemberitahuan lelang ada juga yang tidak terealisasi, seperti halnya tidak adanya pemberitahuan tersebut melalui media informasi, hal ini tentunya juga akan mengurangi para pembeli untuk ikut serta dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Perum Pagdaian terhadap barang jaminan gadai nasabah atau debitur yang tidak di tebus kembali atau dengan kata lain melakukan wanprestasi.

Didalam prakteknya, bahwa penerima gadai tidak memberikan teguran kepada nasabah atau debitur yang lalai melaksanakan kewajibannya, ketentuan ini hanya terhadap benda gadainya yang nilainya sangat kecil, tetapi uang gadainya besar, maka terhadap nasabah yang lalai, pihak penerima gadai memberikan somasi kepada debitur satu kali, apabila somasi itu tidak diindahkan, maka penerima gadai dapat melakukan pelelangan terhadap objek gadai.

Berdasarkan hal tersebut melalui angket yang disebarkan kepada responden, penulis menanyakan tentang “ Apakah Bapak/Ibu mendapatkan somasi dari pihak perum pegadaian bahwa bapak/ibu telah jatuh tempo dan akan dilakukan pelelangan terhadap barang jaminan? “ adapun jawabannya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

TABEL IV .3

TENTANG SOMASI DARI PIHAK PERUM PEGADAIAN

No	Jawaban responden	Jumlah	Persentase
1.	Ya	18	85%
2.	Tidak	2	15%
	Jumlah	20	100%

Sumber data : hasil penelitian tanggal 22 desember 2012

Tabel diatas menunjukkan bahwa 8 mengatakan bahwa mereka diberi tahu terlebih dahulu tentang hutang yang telah jatuh tempo atau mendapat peringatan dari pihak perum pegadaian dan akan dilakukan pelelangan terhadap barang jaminan milik debitur tersebut dan 2 orang mengatakan tidak menerima somasi (teguran dari pihak pegadaian) masalah hutang yang sudah jatuh tempo.

Penulis lebih lanjut menanyakan hal tersebut kepada Bapak Januardi, selaku pemimpin cabang Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota, dengan pertanyaan “ Apakah pihak pegadaian memberikan teguran (somasi) kepada nasabah atau debitur bahwa hutangnya telah jatuh tempo ? “ adapun jawaban

beliau mengatakan bahwa kebanyakan responden tidak menginginkan teguran tersebut sehingga pihak pegadaian merasa tidak perlu untuk memberikan peringatan kepada responden mengenai hutangnya yang telah jatuh tempo tersebut, dan mengenai hal itu juga ada diatur dalam surat bukti kredit, sehingga pihak perum pegadaian tidak perlu melakukan pemberitahuan lagi.⁵

Somasi adalah teguran dari si berpiutang (kreditur) kepada si berutang (debitur) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya.⁶

2. Persiapan lelang

Persiapan lelang dilakukan paling cepat 7 hari sebelum lelang, sedangkan kegiatan antara lain mengeluarkan barang yang akan dilelang dari tempat penyimpanan paling cepat 5 hari sebelum dilelang, barang jaminan yang akan dilelang dicocokkan dengan keterangan surat bukti kredit.

Berdasarkan hal tersebut penulis mengajukan pertanyaan kepada ibu Netti selaku Manajer Fidusia dan Jasa lainnya di Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota dengan pertanyaan “ Apa saja kegiatan yang dilakukan dalam persiapan lelang ? “ adapun jawaban beliau adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan perhitungan secara administrasi terhadap jumlah barang jaminan yang telah masuk jatuh tempo. Kemudian barang tersebut akan dilelang sesuai dengan tanggal lelang yang tertera pada SBK.

⁵ Bapak Januardi, Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota, Wawancara, Pekanbaru, 17 Desember 2012.

⁶ Salim HS, *Op.Cit*, h 178.

- b. Sebelum lelang pemimpin Pegadaian akan membentuk tim pelaksanaan lelang (sesuai dengan peraturan perusahaan) yang terdiri dari 3 orang yaitu:
 - 1. 1 (satu) orang ketua (pemimpin pegadaian atau salah satu pegawai yang di tunjuk).
 - 2. 2 orang anggota yang bertugas sebagai kasir lelang dan petugas administrasi.
 - c. Panitia lelang minimal sudah terbentuk 2 minggu sebelum pelaksanaan lelang
 - d. Melakukan serah terima barang jaminan dari penyimpanan atau pemegang gudang kepada panitia lelang (barang jaminan yang akan dilelang dikeluarkan dari tempat penyimpanannya paling lambat 5 hari sebelum lelang dilaksanakan).
 - e. Barang jaminan yang akan dilelang dicocokkan kembali dengan keterangan yang tertera pada SBK.
 - f. 3 hari sebelum pelaksanaan lelang panitia lelang melakukan taksiran ulang seluruh barang yang akan dilelang, hasil taksiran ulang tersebut ditulis pada halaman belakang SBK. Jika taksiran baru lebih rendah dari rendah dari taksiran lama, sehingga ada kemungkinang menimbulkan kerugian pada pihak perusahaan / debitur, maka barang tersebut tidak boleh lelang.⁷
3. Pelaksanaan lelang

⁷ Ibu Netti, Manajer Fidusia dan Jasa lainnya, *Wawancara*, Pekanbaru, 25 Desember 2012.

- a. Lelang harus dipimpin oleh ketua tim pelaksanaan lelang yang telah ditentukan sebelumnya.
- b. Apabila salah satu anggota tim pelaksanaan lelang berhalangan hadir, maka pekerjaan anggota tersebut diambil alih oleh ketua tim lelang atau diganti dengan pegawai yang lain.
- c. Lelang dilaksanakan diruangan publik, agar dapat diakses oleh seluruh calon pembeli dalam lelang barang jaminan gadai tersebut.
- d. Peserta lelang terbuka untuk umum (siapa saja berhak atau mempunyai hak yang sama), dimana lelang ini dilakukan secara terbuka dan transparan.
- e. Barang-barang yang dilelang harus menurut urutan nomor SBK
- f. Penawaran lelang dilakukan secara meningkat sehingga akan dapat menghasilkan nilai jual yang optimal (harga pasar yg berlaku secara umum)
- g. Hasil penjualan lelang dicatat dalam buku atau formulir yang telah disediakan sebelumnya oleh pegadaian
- h. Dalam pelaksanaan lelang ketua tim lelang akan menyebutkan keterangan-keterangan singkat tentang barang jaminan yang akan dijual sesuai dgn SBK. Adanya cacat dari barang jaminan tersebut harus diumumkan pada waktu lelang, hal ini bertujuan agar tidak adanya pihak yang dirugikan dikemudian hari.
- i. Ketua tim lelang harus mengatur supaya barang jaminan tersebut jangan sampai terjual cepat. Kepada pembeli diberikan kesempatan untuk

melakukan penawaran. setelah mendapat penawaran yang tertinggi, dan tidak adanya penawaran lagi maka harga penjualan akan ditetapkan.⁸

4. Hasil lelang

Barang jaminan yang tidak laku dilelang akan menjadi barang sisa lelang yang merupakan kerugian bagi perusahaan, atau dari barang sisa lelang tersebut akan dilelang untuk dilelang berikutnya. Dan terhadap barang yang sudah laku dilelang, maka semua pembayaran diwaktu lelang dilakukan secara tunai.

Berdasarkan hal tersebut penulis menanyakan kepada ibu Netti selaku Manajer Fidusia dan Jasa lainnya di Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota dengan pertanyaan “ Berapakah uang yang akan dibayar oleh pembeli dan bea lelang ? “ adapun jawaban beliau bea lelang pembeli 9% dibayar oleh pembeli yang sudah termasuk dalam pembelian lelang dan Bea lelang untuk dana sosial/uang miskin sebesar 0.7% dibayar oleh pembeli lelang yang sudah termasuk dalam pembelian lelang.⁹

B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota Dalam Pelaksanaan Penahanan Benda Gadai

Perum pegadaian memproteksi diri dari kemungkinan hilang, rusaknya barang gadai, kebakaran, pencurian dengan asuransi yaitu pada

⁸ Bapak Januardi, Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota, *Wawancara*, Pekanbaru, 17 Desember 2012.

⁹ Ibu Netti, Manajer Fidusia dan Jasa lainnya, *Wawancara*, Pekanbaru, 25 Desember 2012.

asuransi PT. Jasa Indonesia atau PT. Jasindo. Pada dasarnya terhadap barang gadai yang mengalami masalah selama di tahan asuransi akan memberikan ganti kerugian namun kondisi ini harus dipilih-pilih apabila barang tersebut mempunyai nilai yang tinggi bagi pemiliknya, sehingga pada akhirnya ganti kerugian yang diberikan oleh asuransi tidak memiliki manfaat bagi pemiliknya.

Secara prosedural dalam penerimaan barang gadai oleh perum pegadaian akan diregistrasi dan ditempatkan pada suatu tempat tertentu digudang penyimpanan yang berarti seharusnya sebagai pekerjaan rutin kondisi gudang penyimpanan akan diketahui persis, di samping itu kegiatan registrasi akan memberikan keteraturan terhadap administrasi data dari barang gadai, sehingga terhadap hilang atau rusaknya barang gadai merupakan suatu kenyataan rendahnya sumber daya manusia dari Perum Pegadaian.

Perum Pegadaian sebagai suatu usaha BUMN yang bergerak dalam bidang jasa gadai maka tidak juga dengan sendirinya membatasi diri hanya pada jasa gadai tersebut, juga memiliki tanggung jawab yang dapat muncul di dalam menjalankan usaha gadai tersebut, antara lain tanggung jawab terhadap barang gadai, seperti terhadap kemungkinan hilang atau rusaknya barang gadai.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota dalam pelaksanaan penahanan benda gadai :

1. Benda yang digadaikan bukan milik debitur

Benda yang digadaikan bukan milik debitur dapat terjadi karena pemilik barang jaminan tersebut menguasakan kepada orang lain untuk menggadaikan barangnya karena malu datang sendiri ke pegadaian, jika pinjaman di atas satu juta rupiah (Rp 1 juta) maka harus disertai dengan surat kuasa. Jika barang yang digadaikan bukan milik debitur menjadi bermasalah jika benda tersebut merupakan benda hasil tindak kejahatan misalnya pencurian, penggelapan dan lain-lain.

Berdasarkan hal tersebut melalui angket yang disebarakan kepada responden penulis menanyakan tentang “ Milik siapakah barang yang digadaikan pada Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota ? “ adapun jawabannya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

TABEL IV .4

TENTANG KEPEMILIKAN BARANG YANG DIGADAIKAN

No	Jawaban responden	Jumlah	Persentase
1.	Milik sendiri	15	85%
2.	Orang lain	5	15%
	Jumlah	20	100%

Sumber data : hasil penelitian tanggal 22 desember 2012

Hasil tabel diatas menyatakan bahwa masih ada debitur yang menggadaikan barangnya kepada Perum Pegadaian bukan milik sendiri, sehingga ini menjadi kendala dalam penahanan benda gadai.

2. Benda yang digadaikan rusak dalam penyimpanan

Sering terjadi barang jaminan yang disimpan di perum pegadaian mengalami kerusakan atau kehilangan sebagian maupun keseluruhan yang disebabkan oleh karena kebakaran, basah karena kehujanan, gempa bumi atau sebab-sebab lain yang dalam keadaan biasa seharusnya bisa dicegah seperti kehilangan karena kecurian, penggelapan oleh pegawai perum pegadaian.

Penulis melalui wawancara menanyakan hal tersebut kepada ibu Netti selaku Manajer Fidusia dan Jasa lainnya di Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota dengan pertanyaan “ Siapakah yang bertanggung jawab dalam memberikan ganti rugi terhadap barang nasabah yang hilang atau rusak ? “ adapun jawaban beliau apabila barang nasabah mengalami kerusakan/kehilangan yang terjadi akibat kelalaian petugas yang bertanggung jawab adalah petugas penyimpanan/pemegang gudang, dimana kerusakan yang terjadi pada barang jaminan yang berupa barang kantong (perhiasan) akan diperbaiki, sedangkan kerusakan pada barang –barang elektronik akan diperbaiki/diberikan ganti rugi sebesar kerusakan yang terjadi. Sedangkan untuk kehilangan bagian barang jaminan akan diganti sebesar kehilangan menurut taksiran petugas pegadaian.¹⁰

3. Tidak adanya kesepakatan ganti kerugian antara debitur dengan Perum Pegadaian

Sebagaimana dikatakan diatas jika terjadi kerusakan, kehilangan, atau sebab-sebab lain baik sebagian atau keseluruhan maka ganti kerugian

¹⁰ Ibu Netti, Manajer Fidusia dan Jasa lainnya, *Wawancara*, Pekanbaru, 25 Desember 2012.

diberikan sesuai dengan Aturan Dasar Pegadaian Pasal 13 ayat (3), masalah tersebut terjadi ketika nasabah tidak menyepakati besarnya ganti kerugian.¹¹

C. Penyelesaian Terhadap Kendala Yang Dihadapi Oleh Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota

Dari hasil penelitian yang penulis peroleh dari pihak Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota, maka dapat dianalisis mengenai penyelesaian terhadap kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penahanan denda gadai oleh Perum Pegadaian yaitu :

1. Perusahaan umum perum pegadaian tidak dapat dituntut ke pengadilan karena perusahaan umum pegadaian hanya menjalankan tugasnya sesuai dengan perintah jabatannya yaitu peraturan pemerintah Nomor 103 tahun 2000 yaitu perusahaan umum pegadaian ikut membina perekonomian pada masyarakat dengan memberikan pinjaman uang dengan sistem gadai. Jika barang yang digadaikan merupakan barang hasil penggelapan, maka perusahaan umum pegadaian menyerahkan barang tersebut ke pengadilan untuk kemudian pemilik barang yang sah tersebut menebus barangnya di perusahaan umum pegadaian.
2. Menanggung kerusakan yang terjadi karena kebakaran atau sebab-sebab lain yang terletak pada batas kewajiban menjaga dari pihak perum pegadaian tetapi

¹¹ Bapak Januardi, Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota, Wawancara, Pekanbaru, 17 Desember 2012.

jika barang gadai nilainya turun akibat tidak mendapat perawatan sehari-hari pemilik tidak berhak mendapat ganti kerugian.

Uang ganti kerugian ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk barang yang hilang atau rusak sama sekali atau barang tersebut tidak dapat dipakai sama sekali uang ganti kerugian sebesar nilainya ditambah 25% (125% nilai saat digadaikan).
- b. Jika sebagian barang gadai hilang, rusak tidak dapat dipakai lagi, uang ganti kerugian sebesar sifatnya dari bagian yang rusak ditambah 25% (atau 125% dari selisih nilai taksir lama dengan nilai setelah rusak).¹²

¹² *Ibid*

BAB V

PENUTUP

Setelah penulis menguraikan hasil penelitian yang penulis lakukan dalam bab hasil penelitian dan pembahasan, maka akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan dan selanjutnya penulis tanggap dengan memberikan saran-saran, adapun kesimpulan dan saran-saran tersebut adalah sebagai berikut :

A. KESIMPULAN

1. Tindakan yang dilakukan oleh perum pegadaian apabila debitur wanprestasi yaitu secara lelang. Lelang dilakukan apabila nasabah sudah tidak mampu memperpanjang atau menebus barang yang digadaikan. Dilaksanakan setelah jatuh tempo 120 hari atau 4 bulan dari tanggal kredit. Adapun prosedur lelang adalah Pemberitahuan lelang, Persiapan lelang, pelaksanaan lelang, dan hasil lelang.
2. Kendala-kendala yang dihadapi perum pegadaian dalam pelaksanaan penahanan benda gadai yaitu benda yang digadaikan bukan milik debitur, benda yang digadaikan rusak dalam penyimpanan, tidak adanya kesepakatan ganti kerugian antara debitur dengan Perum Pegadaian dan Penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi yaitu pihak perum pegadaian akan menyerahkan benda hasil penggelapan ke pengadilan bila diketahui benda curian, menanggung semua kerusakan apabila terjadi sesuatu keadaan yang tidak diduga.

B. SARAN-SARAN

Adapun saran-saran yang penulis dapat berikan dalam penelitian ini adalah :

1. Perlu ditambahkan atau disebut di dalam isi dari klausul-klausul perjanjian kredit dengan jaminan benda bergerak dalam gadai perlu ditambahkan mengenai besarnya nilai nominal ganti kerugian oleh perum pegadaian apabila barang jaminan mengalami kerusakan hilang atau karena bencana alam, sehingga debitur atau nasabah akan lebih merasa puas dan aman atas keselamatan barang jaminan tersebut
2. Perlu ditambahkan juga dalam memberikan sanksi bagi debitur atau nasabah, yang melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kredit baik sanksi denda maupun pidana, sehingga mengurangi tingkat pelanggaran yang dilakukan debitur atau nasabah.

Sebelum penandatanganan perjanjian kredit sebaiknya nasabah lebih memahami dan mengerti isi dari perjanjian kredit tersebut dan tidak asal menandatangani, karena hal ini penting sekali jika ada klausul-klausul yang memberatkan debitur atau nasabah, maka nasabah tidak akan merasa dirugikan dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru: 2005.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan keempat, PT. Rineka Cipta, Jakarta: 2004.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Budi Untung, *Kredit Perbankan Di Indonesia*, Andi, Yogyakarta: 2000.
- Fariad Wijaya M. dan Soetatwo Hadiwigeno, *Lembaga-Lembaga Keuangan dan Bank, Perkembangan, Teori dan Kebijakan edisi 2*. BPFE, Yogyakarta: 1995.
- _____, *Perkreditan dan Bank Lembaga-Lembaga Keuangan Kita*, BPFE, Yogyakarta: 1991.
- Frianto Pandia, Elly SantiOmpusunnggu dan Achamad Abror, *Lembaga Keuangan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta: 2005.
- F.X. Ngadijarno, Nunung Eko Laksito dan Isti Indri Listiani, *Lelang Teori dan Praktik*, BPPK, Jakarta: 2006.
- Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis, Jaminan fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2001.
- J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 1993.
- _____, *Hukum Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2002.
- Mariam Darius Badzulzaman, *Bab-Bab Tentang Credit Verband, Gadai dan Fidusia*, Alumni, Bandung: 1981.
- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta: 2006.
- Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta : 1985.
- R.Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Penberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung: 1986.

_____, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradya Paramitha, Jakarta: 2001.

Rahmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2001.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta: 1982.

Sutarno, *Aspek-Aspek Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Jakarta : 2003.

Sri Soedewi Maschoen Sofwan, *Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta: 1975.

Undang-Undang

Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1998 tentang Perum Pegadaian.

Peraturan Pemerintah No.103 Tahun 2000 tentang Pegadaian.